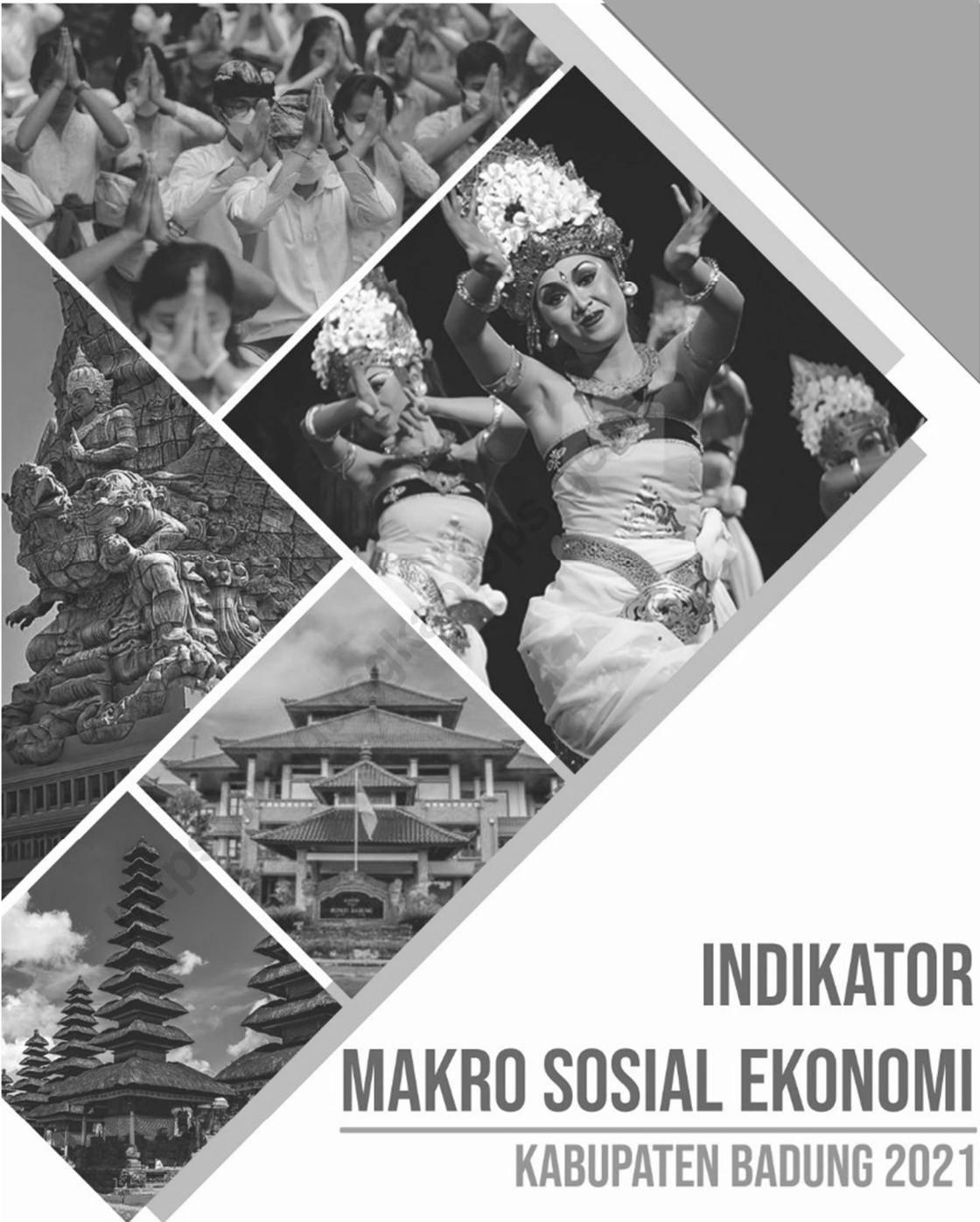


INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI

KABUPATEN BADUNG 2021





INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI

KABUPATEN BADUNG 2021



*BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BADUNG*

INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI KABUPATEN BADUNG 2021

ISSN/ISBN: 978-602-6995-55-1

No. Publikasi: 51030.2119

Katalog: 930208.5103

Ukuran Buku: 15 x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 72 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Badung

Penyunting:

BPS Kabupaten Badung

Desain Kover oleh:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Penerbit:

BPS Kabupaten Badung

Pencetak:

CV. Bhineka Karya

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Dalam era pembangunan sekarang ini, data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mengambil sebuah kebijakan. Kegiatan perencanaan, pengendalian maupun evaluasi tidak akan berhasil tanpa menggunakan data. Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS bertanggung jawab atas perstatistikan di Indonesia, termasuk perstatistikan di daerah.

Publikasi Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2021 ini merupakan publikasi yang menyajikan beberapa capaian-capaian indikator makro di Kabupaten Badung, terutama dilihat dari berbagai sudut pandang indikator makro ekonomi yang tersedia, serta dilengkapi dengan sejumlah indikator sosial untuk memberikan gambaran yang komprehensif.

Disadari bahwa penyajian publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Kendati begitu, selalu diupayakan adanya penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran dari pengguna dan pemerhati data sangat diharapkan dalam penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Mangupura, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Badung



Dr. Yudi Agusta, M.Sc

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KATALOG	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I INFLASI.....	1
BAB II PERTUMBUHAN EKONOMI	7
BAB III KETENAGAKERJAAN.....	13
BAB IV KEMISKINAN.....	21
BAB V PEMBANGUNAN MANUSIA.....	29
BAB VI PEMBANGUNAN GENDER.....	41
BAB VII DISTRIBUSI PENDAPATAN.....	51
BAB VIII KEMAHALAN KONSTRUKSI.....	61
BAB IX PARIWISATA.....	67

DAFTAR TABEL

TABEL	Statistik Hotel di Kabupaten Badung	71
9.1	Tahun 2018-2020	

<https://badungkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	4
GAMBAR 1.2	Perkembangan Inflasi Menurut Kelompok Komoditas di Kota Denpasar Tahun 2020.....	4
GAMBAR 1.3	Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Tahun 2021.....	5
GAMBAR 2.1	Kontribusi PDRB Kabupaten Badung Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2020 (Persen).....	10
GAMBAR 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung, 2016-2020 (Persen).....	11
GAMBAR 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020 (Persen).....	12
GAMBAR 3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2021.	17
GAMBAR 3.2	Persentase Angkatan Kerja menurut Kepemilikan Pekerjaan Kabupaten Badung, 2021.....	19
GAMBAR 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2021.....	19
GAMBAR 4.1	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021.....	24
GAMBAR 4.2	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung, Tahun 2015-2021.....	25
GAMBAR 4.3	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2021....	26
GAMBAR 4.4	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2021....	26
GAMBAR 4.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index</i>) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2021.....	28

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.6	Indeks Keparahan Kemiskinan (<i>Poverty Severity Index</i>) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2021.....	28
GAMBAR 5.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.....	33
GAMBAR 5.2	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021.....	34
GAMBAR 5.3	Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2021.....	35
GAMBAR 5.4	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 (Tahun).....	37
GAMBAR 5.5	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 (Tahun).....	37
GAMBAR 5.6	Paritas Daya Beli Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah per kapita setahun).....	38
GAMBAR 6.1	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung Tahun 2017-2020.....	44
GAMBAR 6.2	Komponen Pembentuk IPM Laki-laki dan IPM Perempuan di Kabupaten Badung Tahun 2020.....	45
GAMBAR 6.3	IPG Kabupaten/Kota se Provinsi Bali Tahun 2020.....	47
GAMBAR 6.4	Capaian IDG Kabupaten Badung Tahun 2016-2020.....	48
GAMBAR 6.5	Capaian IDG Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2020.....	49
GAMBAR 7.1	Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2016-2020.....	57
GAMBAR 7.2	Gini Rasio Kabupaten/kota se-Provinsi Bali, Tahun 2020.....	58

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 8.1	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Badung Tahun 2016-2020.....	64
GAMBAR 8.2	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2020.....	65
GAMBAR 9.1	Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui Bandara Udara Ngurah Rai Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....	70

<https://badungkab.bps.go.id>

<https://badungkab.bps.go.id>

Bab I INFLASI

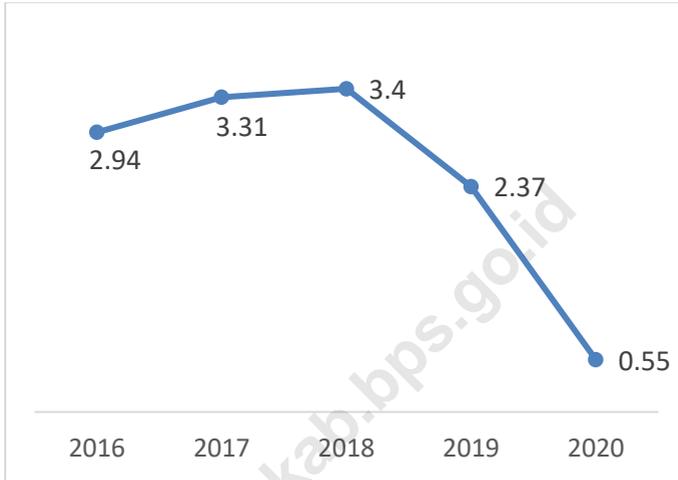
<https://badungkab.bps.go.id>

Indikator ekonomi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Yang dimaksud dengan harga dalam Inflasi adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, dalam hal ini indeks harga konsumen (IHK). IHK itu sendiri merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah dengan menggunakan diagram timbang nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau.

Kabupaten Badung merujuk pada Inflasi Kota Denpasar. Pada tahun 2020, inflasi yang terjadi sebesar 0,55 persen. Cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,37 persen. Rendahnya angka inflasi di tahun 2020 tidak terlepas dari *supply* dan *demand* yang masih cenderung lesu akibat Pandemi Covid-19 terutama untuk kebutuhan paling pokok dari masyarakat. Secara umum, Inflasi yang cenderung terkendali dapat berdampak secara tidak langsung pada semakin terkendalnya permasalahan-permasalahan ekonomi makro seperti pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan.

Gambar 1.1

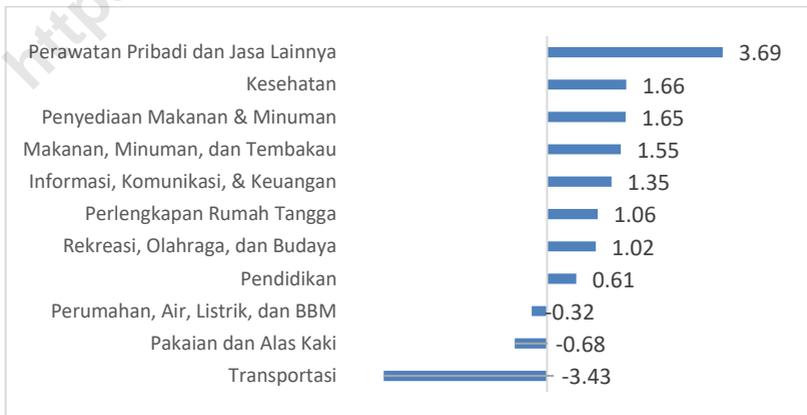
Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Denpasar Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Gambar 1.2

Perkembangan Inflasi Menurut Kelompok Komoditas di Kota Denpasar Tahun 2020

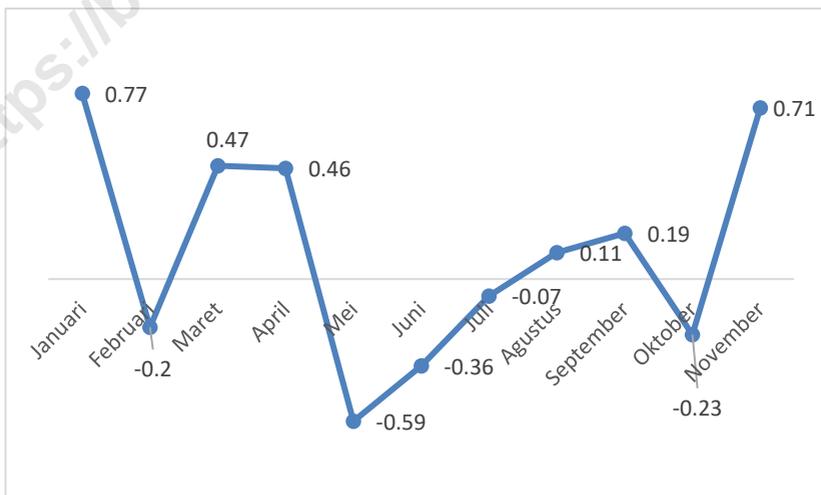


Sumber: BPS Kabupaten Badung

Pergerakan Inflasi di Kota Denpasar pada tahun 2020 sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,69 persen, Sementara kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar mengalami deflasi sebesar 0,32 persen, pakaian dan alas kaki deflasi sebesar 0,68 persen, dan transportasi deflasi sebesar -3,43 persen.

Pada tahun 2021, inflasi Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Sampai dengan bulan November 2021, Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2021 yaitu mencapai 0,77 persen. Selain itu inflasi yang cukup tinggi juga terjadi pada bulan November 2021 yaitu sebesar 0,71 persen.

Gambar 1.3
Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Badung

<https://badungkab.go.id>

Bab II

PERTUMBUHAN

EKONOMI

<https://badungkab.bps.go.id>

Indikator yang sering digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diperlihatkan dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Dalam penghitungannya, angka ini telah mengeluarkan faktor harga pada tahun berjalan/bersangkutan sehingga dapat dilihat perkembangan produksi yang dihasilkan suatu daerah yaitu produksi barang dan jasa dari sektor-sektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Badung.

Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Badung pada tahun 2020 sebesar 49,215 triliun rupiah, mengalami penurunan 13,508 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang mencapai 62,723 triliun rupiah. Dengan total nilai yang telah dicapai pada tahun 2020, Kabupaten Badung mampu menyumbangkan 21,95 persen dari total PDRB yang terbentuk di Provinsi Bali.

Secara riil, nilai PDRB Kabupaten Badung pada tahun 2020 mencapai 31,159 triliun rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 6,165 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 37,325 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB secara riil ini dapat diartikan bahwa ekonomi Kabupaten Badung mengalami kontraksi sedalam 16,52 persen pada tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami kontraksi yang sangat dalam karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya kegiatan ekonomi hampir di seluruh negara di dunia. Kabupaten Badung yang selama ini ditopang oleh Kategori Akomodasi dan Makan Minum serta Kategori Transportasi, otomatis mengalami kontraksi yang sangat dalam karena sangat bergantung oleh kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Hingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami kontraksi dalam sebesar -16,52 persen. Angka ini lebih dalam jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mencapai -9,31 persen.

Gambar 2.1
Kontribusi PDRB Kabupaten Badung Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2020 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Badung

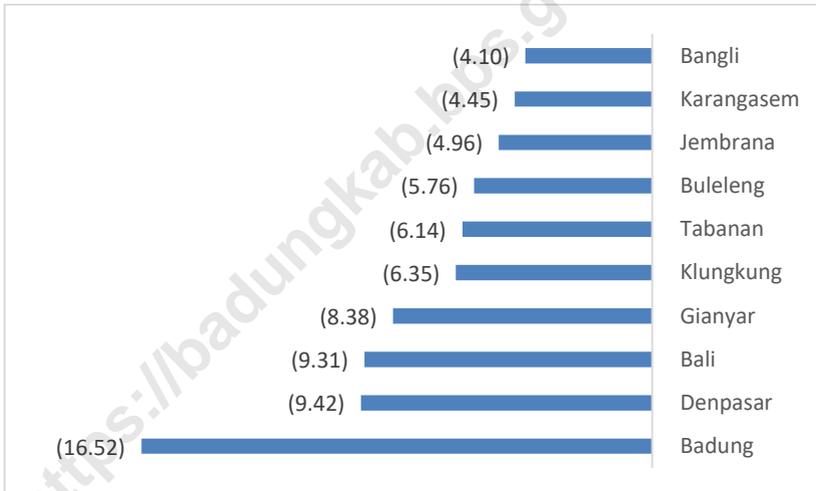
Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung, 2016-2020 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2020 berada pada posisi terakhir dengan laju pertumbuhan ekonomi paling dalam.

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2020 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Badung

<https://balungkab.bps.go.id>

Bab III

KETENAGAKERJAAN

<https://badungkab.bps.go.id>

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja memiliki potensi besar dalam mempercepat perkembangan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikatakan sebagai objek sekaligus subjek utama pembangunan yaitu sebagai penggerak roda perekonomian di suatu daerah,

Berdasarkan undang-undang Ketenagakerjaan, seseorang dikatakan telah memasuki kategori penduduk usia kerja ketika telah berumur 15 tahun. Pada tahun 2021, terdapat sejumlah 557.972 penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Badung. Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Badung menampung sebanyak 15,90 persen dari seluruh penduduk usia kerja di Provinsi Bali yang berjumlah 3.509.090 jiwa.

Menurut aktifitas yang dilakukannya, penduduk usia kerja dapat digolongkan menjadi dua kategori yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu (pada masa referensi survei) mempunyai pekerjaan, baik yang memang melakukan aktifitas bekerja maupun yang

sementara tidak bekerja karena satu dan lain hal seperti sedang cuti, menunggu panen, atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja profesional seperti penyanyi, dukun, dalang, dsb). Selain itu, termasuk pula ke dalam kategori angkatan kerja yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan.

Penduduk yang termasuk pada kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu (pada masa referensi survei) hanya melakukan aktifitas sekolah, mengurus rumah tangga, atau tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja atau mencari pekerjaan. Di antara penduduk usia kerja di Kabupaten Badung pada tahun 2021, sebanyak 27,47 persen termasuk pada kategori bukan angkatan kerja karena mereka tidak aktif dalam dunia kerja selama seminggu yang lalu (masa referensi survei).

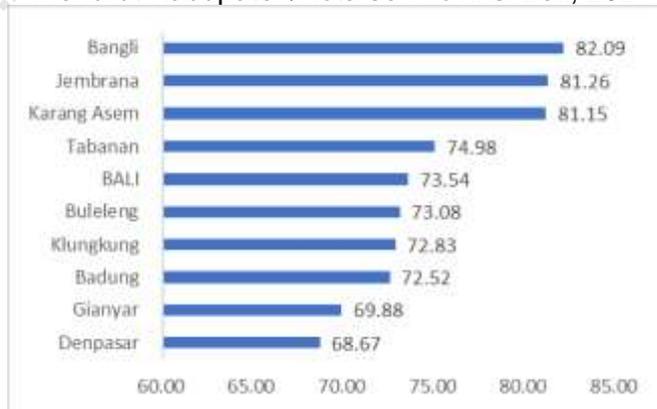
Sementara sebanyak 72,52 persen dari penduduk usia kerja di Kabupaten Badung pada tahun 2021 termasuk sebagai angkatan kerja. Persentase jumlah angkatan kerja diantara penduduk usia kerja ini biasa disebut dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Badung tahun 2021 sebesar 72,52 persen artinya dari 100 penduduk usia kerja di

Kabupaten Badung, 72 orang tersedia atau siap untuk melakukan berbagai aktifitas ekonomi.

TPAK menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia dan dapat diberdayakan di berbagai bidang pekerjaan. Apabila suatu wilayah ingin mengukur seberapa banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan untuk dapat menyerap seluruh tenaga kerja, maka indikator ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dengan mempertimbangkan pula aspek potensi kewilayahan. Di antara kesembilan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, Kabupaten Badung menempati urutan ke-7 terbesar dalam hal kepemilikan potensi jumlah tenaga kerja, sebagaimana tersirat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2021



Sumber: BPS Provinsi Bali

Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020, peringkat TPAK Kabupaten Badung tetap pada posisi ketujuh, namun dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pergerakan tenaga kerja keluar dari Badung untuk bekerja di kabupaten lain akibat adanya Pandemi Covid-19.

Di antara penduduk yang tergolong angkatan kerja, terdapat sebanyak 93,07 persen yang aktif bekerja selama seminggu yang lalu (masa referensi survei), sedangkan 6,93 persen sisanya tergolong sebagai pengangguran. Hal ini berarti di antara 100 orang penduduk yang siap kerja, terdapat 7 orang yang tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, tingkat pengangguran di Kabupaten Badung menduduki peringkat kedua pada tahun 2021 setelah Denpasar. Bahkan melebihi tingkat pengangguran secara total di Provinsi Bali (5,37 persen).

Berdasarkan pemeringkatan tersebut, dapat dikatakan bahwa di masa Pandemi Covid-19 ini, kondisi lapangan usaha di Kabupaten Badung masih belum berjalan normal. Upaya untuk memaksimalkan potensi tenaga kerja di Kabupaten Badung masih harus terus digalakkan agar seluruh tenaga kerja yang ada dapat terserap baik melalui penciptaan berbagai lapangan kerja baru maupun lapangan pekerjaan yang sudah ada sebelumnya.

Gambar 3.2.

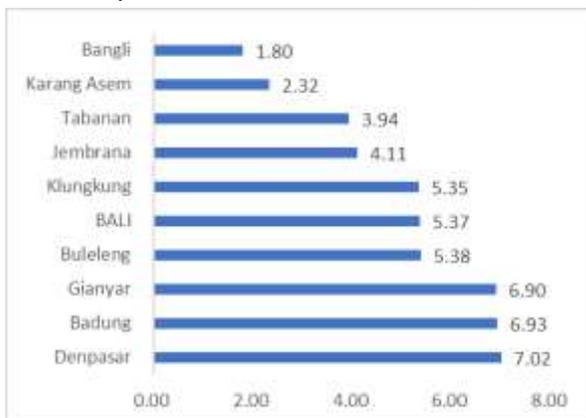
Persentase Angkatan Kerja menurut Kepemilikan Pekerjaan Kabupaten Badung, 2021



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Gambar 3.3.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2021



Sumber: BPS Kabupaten Badung

<https://badungkab.bps.go.id>

Bab IV

KEMISKINAN

<https://badungkab.bps.go.id>

Berbicara mengenai kondisi perekonomian yang dikaitkan dengan kondisi sosial di suatu wilayah tak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai kemiskinan. Kemiskinan dapat dijadikan ukuran pembangunan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kemiskinan yang meningkat dapat memberikan sinyal bahwa iklim perekonomian perlu diperbaiki dan pembangunan kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia.

Dalam menentukan penduduk yang miskin dan penduduk yang tidak miskin, BPS menggunakan Garis

Kemiskinan sebagai *cut point*, dimana penduduk yang konsumsi rata-rata per kapitanya kurang dari Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan ini diperoleh dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada tahun 2021, Garis Kemiskinan Kabupaten Badung sebesar 587,737 rupiah.

Gambar 4.1.
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2021

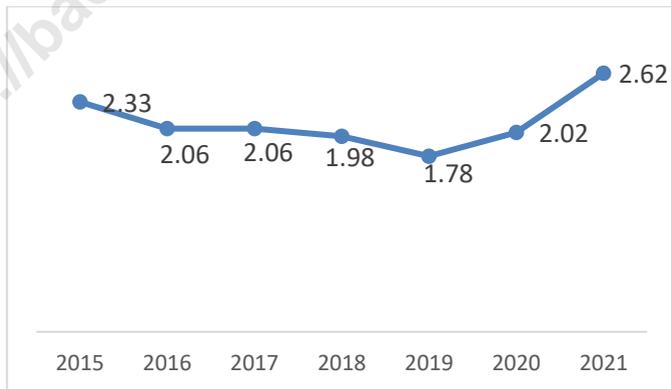


Sumber: BPS Kabupaten Badung

Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, penduduk digolongkan menjadi dua kelompok besar, yakni penduduk miskin dan penduduk tidak miskin menurut pengeluaran perkapita per bulannya. Pada tahun 2021 ini, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Badung mengalami

peningkatan, yakni dari 13,75 ribu orang pada tahun 2020 menjadi 18,52 ribu orang pada tahun 2021. Peningkatan ini yang menyebabkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung juga meningkat yaitu dari 2,02 persen menjadi 2,62 persen. Adanya peningkatan baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung, diduga disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak penduduk di Kabupaten Badung kehilangan pekerjaan sehingga banyak penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau berada di bawah garis kemiskinan.

Gambar 4.2.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung,
Tahun 2015-2021

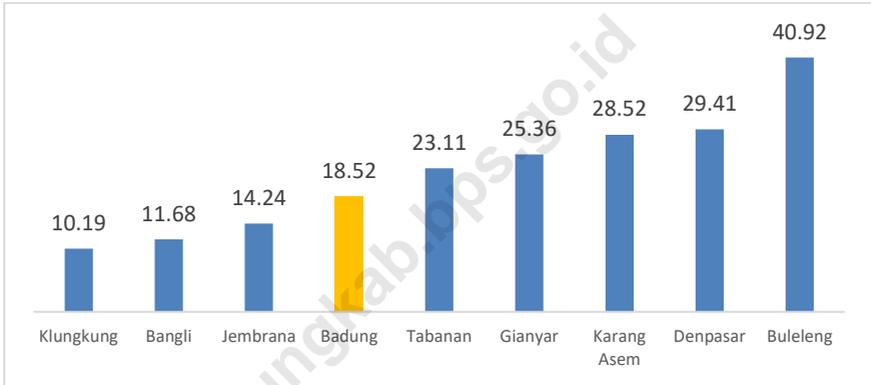


Sumber: BPS Kabupaten Badung

Apabila dibandingkan antar wilayah di Provinsi Bali, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Badung pada

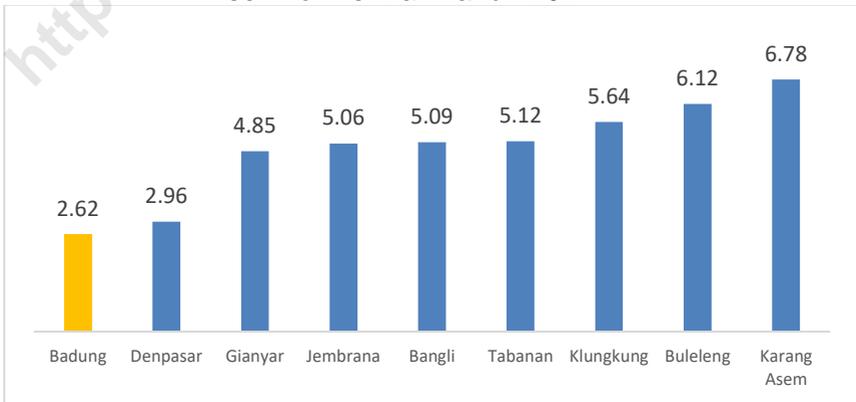
tahun 2021 menduduki posisi keempat terendah di antara kesembilan kabupaten/kota lainnya.

Gambar 4.3.
Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Gambar 4.4.
Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2021



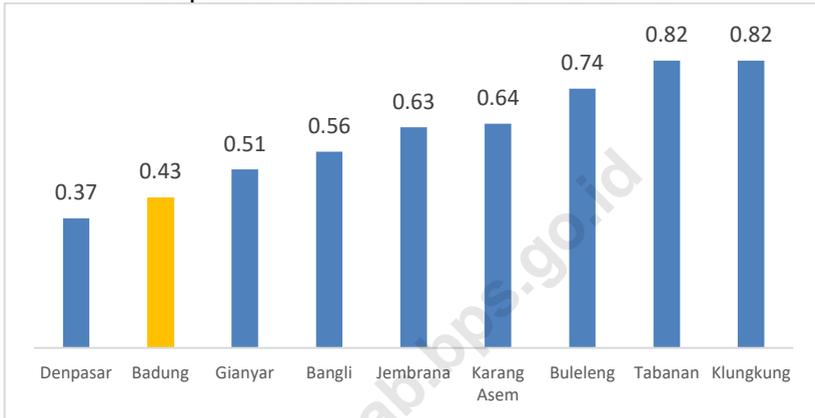
Sumber: BPS Kabupaten Badung

Selain jumlah dan persentase, indikator lain terkait kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), yang menunjukkan seberapa jauh jarak antara rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Pada tahun 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung sebesar 0,43 poin. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang mencapai 0,31 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun dan menjauhi garis kemiskinan.

Selain mengukur kedalaman kemiskinan, BPS juga mengukur disparitas atau jarak kesenjangan pendapatan yang terjadi antar penduduk miskin. Kesenjangan tersebut diukur dengan indikator yang disebut dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*). Pada tahun 2021, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung sebesar 0,10 poin. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang masih berada pada 0,07 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin semakin melebar pada tahun 2021. Di antara sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali, Kabupaten Badung menempati urutan ke-5 dengan Indeks Keparahan Kemiskinan terbesar. Angka ini sama dengan Indeks Keparahan Kemiskinan rata-rata Provinsi Bali.

Gambar 4.5.

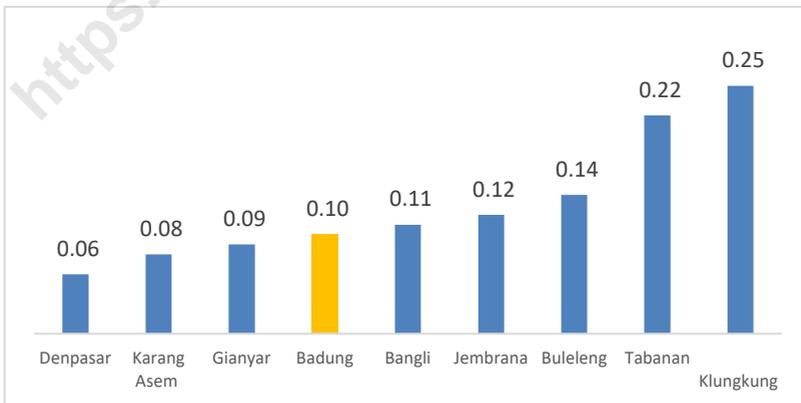
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Gambar 4.6.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Badung

<https://badungkab.bps.go.id>

Bab V

PEMBANGUNAN

MANUSIA

<https://badungkab.bps.go.id>

Pembangunan yang ideal pada dasarnya mencakup pembangunan secara keseluruhan. Tidak hanya pembangunan ekonomi yang perlu ditingkatkan oleh suatu negara/wilayah, tetapi pembangunan manusianya juga menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Hal inilah yang mendorong para pimpinan negara/wilayah untuk merubah paradigma bahwa fokus pandang dari pembangunan ekonomi tidak berdasarkan pada perhitungan pendapatan nasional, tetapi berorientasi pada pembangunan manusia sebagai makhluk sosial. Pembangunan manusia pada dasarnya mencakup tiga komponen yang mendasar pada diri manusia yaitu peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*). Oleh karena itu diperlukan indikator pengukuran pembangunan manusia yang dapat digunakan untuk melihat sudah sejauh mana pelaksanaan pembangunan manusia berjalan di suatu wilayah. Indikator yang biasa digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada dasarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan harapan hidup yang dihitung berdasarkan angka

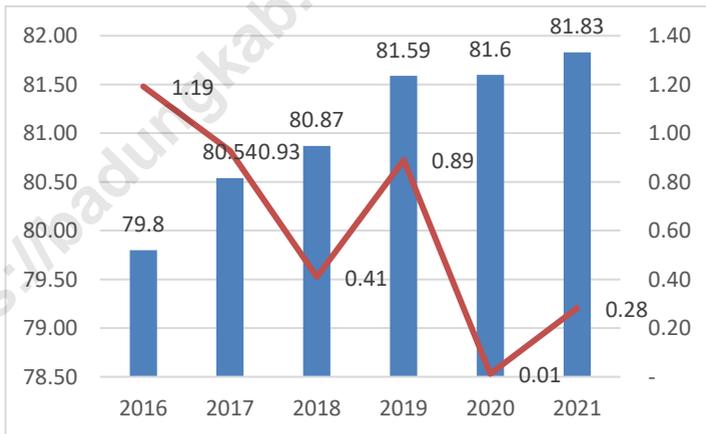
harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli dalam rupiah).

Sebagai kabupaten yang menjadi sentra ekonomi di Provinsi Bali, Kabupaten Badung mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor perekonomian. Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Badung. Meskipun banyak kesempatan kerja yang diciptakan, bila kualitas SDM Kabupaten Badung lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada, maka lambat laun peluang kerja akan diisi oleh para pendatang. Jawaban dari permasalahan tersebut adalah melalui strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar pemerataan hasil-hasil pembangunan tercapai.

Pada gambar 5.1 dapat diketahui bahwa selama enam tahun terakhir IPM di Kabupaten Badung mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 79,80 menjadi 81,83 pada tahun 2021. Dengan nilai IPM sebesar 81,83 Kabupaten Badung masuk dalam kategori wilayah dengan

IPM level tinggi. Selain itu, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Badung pada tahun 2021 mencapai 0,28 persen. Capaian nilai IPM yang relatif tinggi tersebut cukup membanggakan, namun indikator-indikator pembentuk IPM tetap perlu diperhatikan agar pembangunan daerah dapat berjalan maksimal dengan dukungan sumber daya manusia yang optimal.

Gambar 5.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung
Tahun 2016-2021



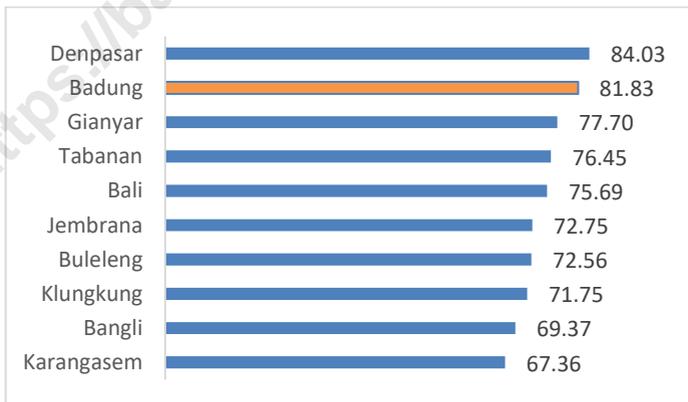
Sumber: BPS Kabupaten Badung

Dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali, pada tahun 2021 Kabupaten Badung masih menempati peringkat kedua dalam capaian IPM. Capaian IPM tertinggi ditempati oleh Kota Denpasar yang mempunyai nilai 84,03. Sementara di posisi terakhir ditempati oleh Kabupaten Karangasem yang

mencapai nilai 67,36. Dengan capaian Kabupaten Badung yang berada pada posisi kedua, merupakan tantangan bagi Kabupaten Badung untuk tetap berorientasi pada pembangunan manusia ke depannya, karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dalam proses pembangunan daerah. Upaya peningkatan IPM tidak dapat dilakukan secara instan, akan tetapi dengan mensinergikan antara pembangunan ekonomi, perbaikan derajat kesehatan serta peningkatan pengetahuan dan pendidikan penduduk Badung. Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih lanjut bagaimana komponen pembentuk IPM di Kabupaten Badung.

Gambar 5.2

Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021

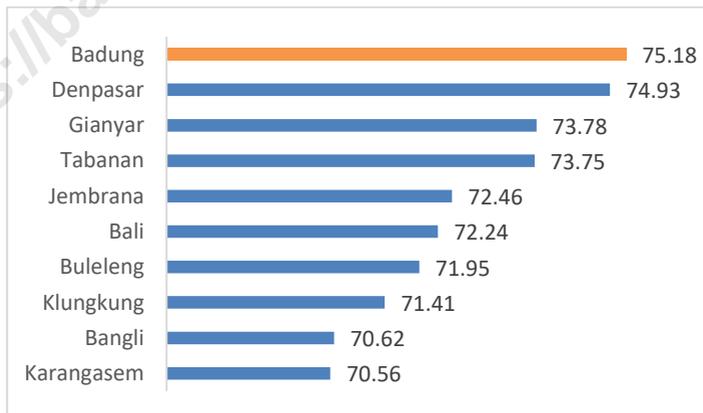


Sumber: BPS Kabupaten Badung

Indikator Usia Harapan Hidup sering digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan karena

Usia Harapan Hidup dapat menggambarkan sejauh mana tingkat kesehatan penduduk pada daerah tertentu, semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat secara tak langsung dapat menaikkan angka harapan hidupnya. Pada tahun 2021, Usia Harapan Hidup Kabupaten Badung sebesar 75,18. Menduduki peringkat pertama dalam capaian Usia Harapan Hidup. Strategi di bidang kesehatan seperti mengupayakan lingkungan yang sehat, pola hidup sehat, ketersediaan fasilitas kesehatan serta akses terhadap fasilitas kesehatan menjadi komponen penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Badung.

Gambar 5.3.
Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Selain derajat kesehatan, IPM dibentuk dari tingkat pengetahuan dan mutu sumber daya manusia yang dilihat dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Makin tinggi angka harapan lama sekolah maka semakin baik tingkat pengetahuan dan mutu sumber daya manusianya. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Badung pada tahun 2021 mencapai 13,99 tahun, mengalami peningkatan 0,01 poin dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini berarti harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas di Kabupaten Badung sebesar 13,99 tahun atau tamat Pendidikan Tinggi Diploma I/II. HLS Kabupaten Badung ini menempati posisi kedua setelah Kota Denpasar yang mencapai 14,09.

Tingginya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Badung pada tahun 2021, masih memiliki jarak dengan Rata-rata Lama Sekolah yang dicapai oleh penduduk 25 tahun ke atas. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Badung pada tahun 2021 mencapai 10,62 tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung hanya mencapai

kelas 1 pada tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Gambar 5.4.

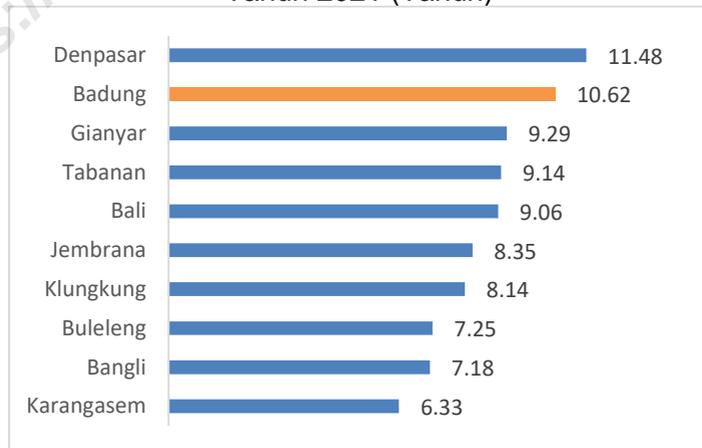
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 (Tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Gambar 5.5.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 (Tahun)

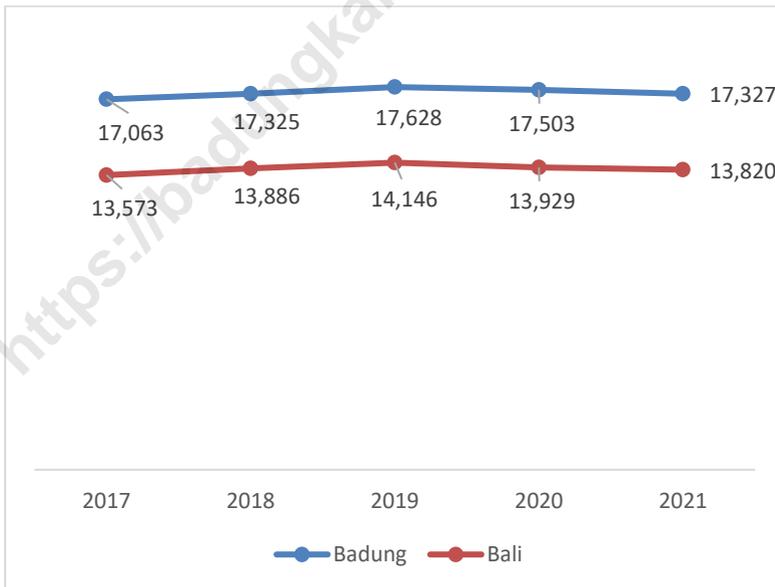


Sumber: BPS Kabupaten Badung

Selain derajat kesehatan dan tingkat pendidikan, standar hidup layak juga menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya kondisi ekonomi berikut pemerataannya. Daya beli masyarakat dalam penghitungan IPM didekati dengan nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

Gambar 5.6.

Paritas Daya Beli Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah per kapita setahun)



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun sejak

adanya Pandemi Covid-19, kemampuan daya beli penduduk di Kabupaten Badung cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2021 mencapai 17,327 juta rupiah per kapita per tahun. Namun jika dibandingkan dengan paritas daya beli Provinsi Bali secara umum dari tahun ke tahun, nampak jelas terlihat kemampuan daya beli penduduk di Kabupaten Badung selalu berada di atas kemampuan daya beli penduduk di Provinsi Bali.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan daya beli penduduk adalah dengan aktifnya penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi rakyat seperti adanya kelompok usaha bersama, serta peningkatan produktivitas pada komoditi unggulan dapat menggiatkan perekonomian rakyat yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli penduduk Badung.

<https://badungkab.bps.go.id>

Bab VI

PEMBANGUNAN

GENDER

<https://badungkab.bps.go.id>

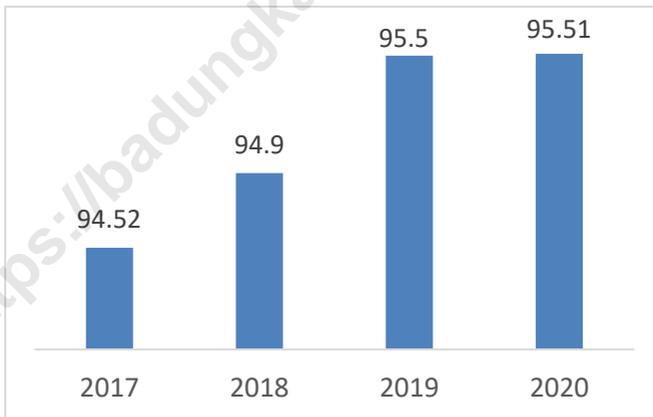
Pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan Pemerintah Indonesia sejak era reformasi, diharapkan mampu untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan yang dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Selain itu, agenda pembangunan pemerintah tidak hanya ditujukan pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga kepada pembangunan manusia. Bahkan catatan penting pemerintahan saat ini mengharuskan pemerintah juga mewujudkan keberhasilan pembangunan gender. Tentu saja keberhasilan pembangunan tersebut tidak mudah, sangat tergantung dari sumber daya manusia, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat, serta pengaruh sosial kultural yang menyertai kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah.

Wilayah dengan kemajuan dalam pembangunan manusianya cenderung lebih baik dalam pembangunan yang terkait gender. Jumlah penduduk perempuan yang besar merupakan potensi sumber daya manusia yang nyata dalam mewujudkan kemakmuran suatu wilayah. Kaum perempuan tidak hanya berpotensi mendidik generasi muda yang berkualitas, namun juga ikut serta berpartisipasi dalam membangun suatu wilayah. Dengan demikian, perempuan yang berkualitas secara nyata akan meningkatkan kemakmuran di suatu wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pembahasan mengenai capaian

pembangunan manusia yang sudah mengakomodasi kesetaraan gender. Pembahasan tersebut merupakan informasi yang sangat berguna khususnya bagi pemerintah daerah bagi upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk perempuan sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender di suatu wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan keberhasilan kesetaraan gender adalah IPG (Indeks Pembangunan Gender).

Gambar 6.1

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung
Tahun 2017-2020



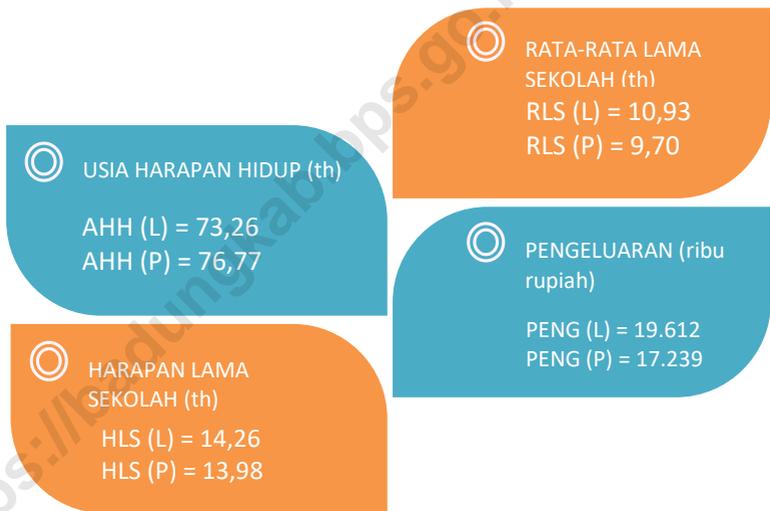
Sumber: BPS Kabupaten Badung

Semua wilayah di Indonesia mempunyai semangat yang sama dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender termasuk di Kabupaten Badung. Pada tahun 2020, IPG Kabupaten Badung mencapai 95,51. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang

mencapai 95,50. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah masuk dalam kategori baik yaitu ditunjukkan dengan nilai IPG yang mendekati nilai 100.

Gambar 6.2

Komponen Pembentuk IPM Laki-laki dan IPM Perempuan di Kabupaten Badung Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Badung

IPG merupakan indeks komposit yang dibentuk oleh perbandingan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Oleh karena itu, IPG secara tidak langsung juga dibentuk oleh beberapa komponen yaitu Usia Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2020, Usia Harapan

Hidup Laki-laki sebesar 73,26 tahun. Lebih rendah dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Perempuan yang mencapai 76,77 tahun.

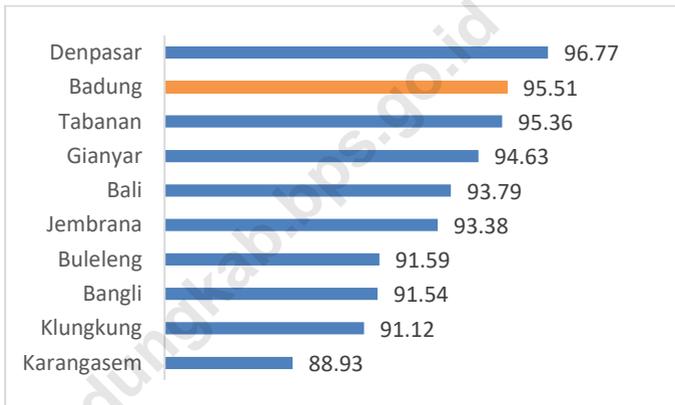
Dari aspek pendidikan, penduduk perempuan di Kabupaten Badung rata-rata mengenyam pendidikan selama 9,70 tahun atau sampai dengan kelas 9 pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara penduduk laki-laki mengenyam pendidikan lebih lama dibandingkan perempuan yaitu selama 10,93 tahun atau sampai dengan kelas 10 atau 11 pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan penduduk laki-laki dalam kesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Selain rata-rata lama sekolah, aspek pendidikan yang juga membentuk nilai IPG di Kabupaten Badung adalah Harapan Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah laki-laki di Kabupaten Badung pada tahun 2020 mencapai 14,26 tahun. Sementara harapan lama sekolah perempuan mencapai 13,98 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa harapan untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi bagi penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Dari sisi pengeluaran per kapita, penduduk laki-laki cenderung memiliki pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2020,

pengeluaran per kapita penduduk laki-laki sebesar 19,612 juta rupiah per tahun, sementara pengeluaran penduduk per kapita perempuan mencapai 17,239 juta rupiah per tahun.

Gambar 6.3
IPG Kabupaten/Kota se Provinsi Bali Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Dari seluruh komponen pembentuk IPM yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai IPM perempuan sebesar 80,19 dan IPM laki-laki sebesar 83,96. Hal inilah yang akan membentuk IPG Kabupaten Badung pada tahun 2020 sebesar 95,51. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Badung telah diupayakan dengan seoptimal mungkin, namun masih terdapat ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Gambar 6.4
Capaian IDG Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

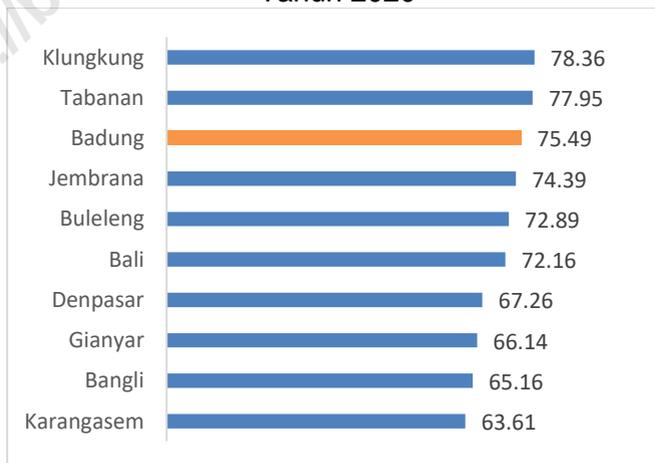


Sumber: BPS Kabupaten Badung

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Dimensi pembentuk IPG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan, dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya alam direpresentasikan dengan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Capaian IDG Kabupaten Badung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kabupaten Badung semakin meningkat. Perempuan di Kabupaten Badung lebih berperan aktif terhadap ekonomi dan politik dibandingkan dengan peran perempuan di beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Bali. Hal ini ditunjukkan dengan peringkat IDG Kabupaten Badung yang menduduki posisi ketiga di antara Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah Provinsi Bali. Bahkan secara rata-rata, IDG Kabupaten Badung mampu melebihi IDG Provinsi Bali yang mencapai 72,16.

Gambar 6.5
Capaian IDG Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali
Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Badung

<https://badungkab.bps.go.id>

Bab VII

DISTRIBUSI

PENDAPATAN

PENDUDUK

<https://badungkab.bps.go.id>

Dalam upaya pembangunan ekonomi di suatu daerah, umumnya strategi diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu daerah.

Di luar aspek pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah, sejatinya ada tujuan yang lebih esensi terkait dengan aspek pembangunan manusia seutuhnya, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat disertai pendistribusian pendapatan yang adil dan merata. Aspek pemerataan kesejahteraan ini merupakan ukuran sejauh mana masyarakat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang di kalangan atas, namun juga dapat terdistribusi secara adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang kompleks, tidak hanya di kabupaten-kabupaten di Indonesia, bahkan banyak negara juga belum dapat mengatasi masalah ketimpangan tersebut. Untuk mengukur sejauh mana pendapatan terdistribusi di masyarakat, Bank Dunia menggunakan perhitungan “desil” untuk membagi penduduk menurut

kelompok pendapatan menjadi tiga kelompok pendapatan yakni 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Dalam menilai pemerataan, perhatian difokuskan pada perkembangan pendapatan pada kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah. Bank Dunia menggunakan kriteria ketimpangan sebagai berikut:

- a. Jika 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari pendapatan total suatu daerah, maka ketimpangan pendapatan di daerah tersebut dikategorikan tinggi.
- b. Jika 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima sebesar 12 - 17 persen dari pendapatan total suatu daerah, maka ketimpangan pendapatan di daerah tersebut dikategorikan sedang.
- c. Jika 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan total suatu daerah, maka ketimpangan pendapatan di daerah tersebut dikategorikan rendah.

Dengan mengikuti formulasi Bank Dunia, hasil analisis data Susenas 2020 menunjukkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan terendah di Kabupaten Badung dapat menikmati sebesar 19,70 persen pendapatan total di Kabupaten Badung. Sehingga dapat dikatakan bahwa

menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung tergolong rendah.

Penduduk pada kelompok pendapatan rendah ini sangat rentan terhadap perubahan iklim perekonomian di suatu daerah. Sering kali penduduk pada kelompok ini tidak dapat merasakan adanya ketimpangan karena merasa pendapatan mereka secara absolut meningkat dari waktu ke waktu. Namun apabila dihitung menurut porsi pendapatan yang mereka terima terhadap total pendapatan di suatu daerah, porsi pendapatan mereka mengalami ternyata justru semakin kecil. Sehingga tanpa terasa ketimpangan kesejahteraan di suatu daerah semakin lebar antara si kaya dan si miskin karena pendapatan daerah hanya dinikmati oleh kelompok penduduk berpendapatan tinggi.

Selain kriteria tersebut, salah satu indikator yang juga penting untuk menilai ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Dalam penghitungan gini rasio, data yang idealnya digunakan adalah data pendapatan penduduk. Namun, karena sulitnya mendapatkan informasi pendapatan yang lengkap dari responden, data pengeluaran penduduk digunakan sebagai pendekatan untuk memperoleh data pendapatan.

Dalam penghitungannya, untuk mendapatkan Indeks Gini Rasio digunakan formula sebagai berikut

$$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Dimana G = GR (*Gini Ratio*)

P = Persentase penduduk

Q = Persentase kumulatif pengeluaran

Nilai *Gini Ratio* berada antara 0 dan 1. Bila GR sama dengan Nol, berarti distribusi pendapatan amat merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Penentuan kategori ketimpangan pendapatan berdasarkan nilai gini rasio menurut Oshima menggunakan ketentuan sebagai berikut:

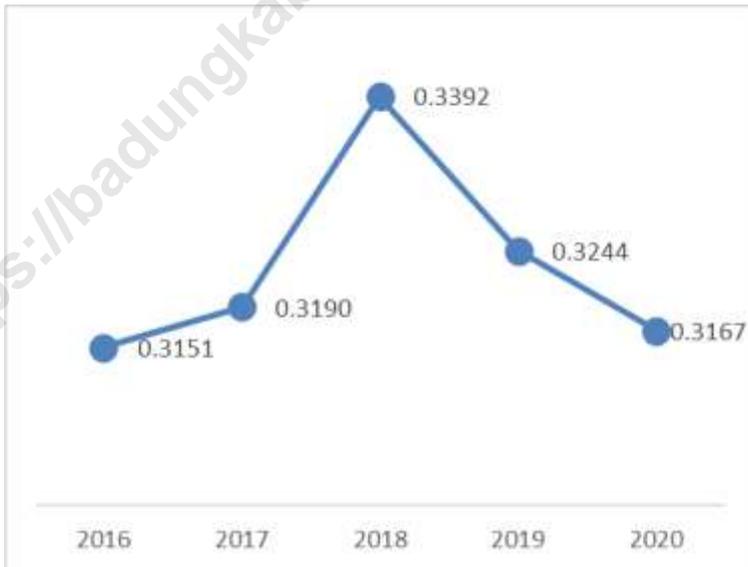
- a. Tingkat ketimpangan rendah apabila nilai GR antara 0 – 0,3
- b. Tingkat ketimpangan sedang apabila nilai GR antara 0,3 – 0,5
- c. Tingkat ketimpangan tinggi apabila nilai GR lebih besar dari 0,5

Berdasarkan hasil penghitungan Gini Ratio di Kabupaten Badung pada tahun 2021 tercatat bahwa tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Badung berada dalam ketimpangan sedang yaitu dengan angka indeks sebesar 0,3167 dimana angka ini terletak diantara 0,3 sampai 0,5.

Gini Rasio Kabupaten Badung lebih rendah dari Provinsi Bali yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,3690 meskipun masih dalam kategori yang sama yakni pada kondisi ketimpangan sedang. Fenomena ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung dari tahun 2018 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang mulai menyempit.

Gambar 7.1

Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

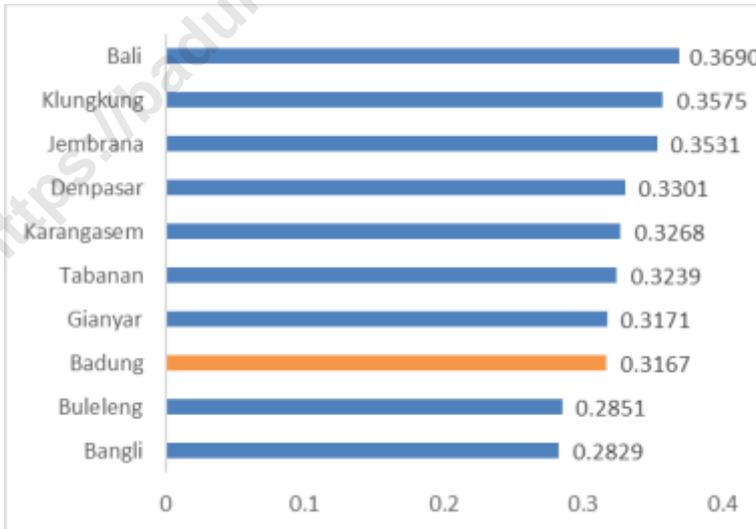


Sumber: BPS Kabupaten Badung

Fenomena baik ini sangat perlu dipertahankan dan bahkan terus diminimalisir. Oleh karena mempertahankan lebih sulit daripada meraih, upaya untuk mencapai pemerataan bagi seluruh masyarakat baiknya terus digalakkan. Program yang telah dicanangkan baiknya tidak hanya terfokus pada bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga memperhatikan bagaimana mencapai pemerataan. Dengan demikian, kesejahteraan penduduk pada kelompok menengah ke bawah akan lebih terjamin.

Gambar 7.2

Gini Rasio Kabupaten/kota se-Provinsi Bali, Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali, tingkat ketimpangan di Kabupaten Badung menempati urutan ketiga dimana masuk dalam kategori sedang. Terdapat 2 kabupaten di Provinsi Bali yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah yaitu Kabupaten Bangli dan Buleleng.

<https://badungkab.bps.go.id>

<https://badungkab.bps.go.id>

Bab VIII

INDEKS KEMAHALAN

KONSTRUKSI

<https://badungkab.bps.go.id>

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks yang digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Penghitungan IKK didasarkan atas suatu pendekatan yaitu pendekatan harga input dan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan harga output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

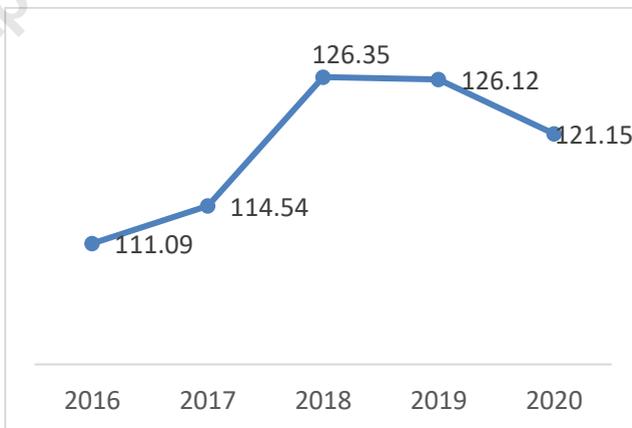
Dengan adanya masing-masing kelemahan di antara kedua pendekatan tersebut, maka alternatif penghitungan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan harga konstruksi yang dapat mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga

dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

Selain itu dalam penghitungan IKK, digunakan realisasi (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK. Oleh karena itu, setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

Gambar 8.1.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Badung
Tahun 2016-2020

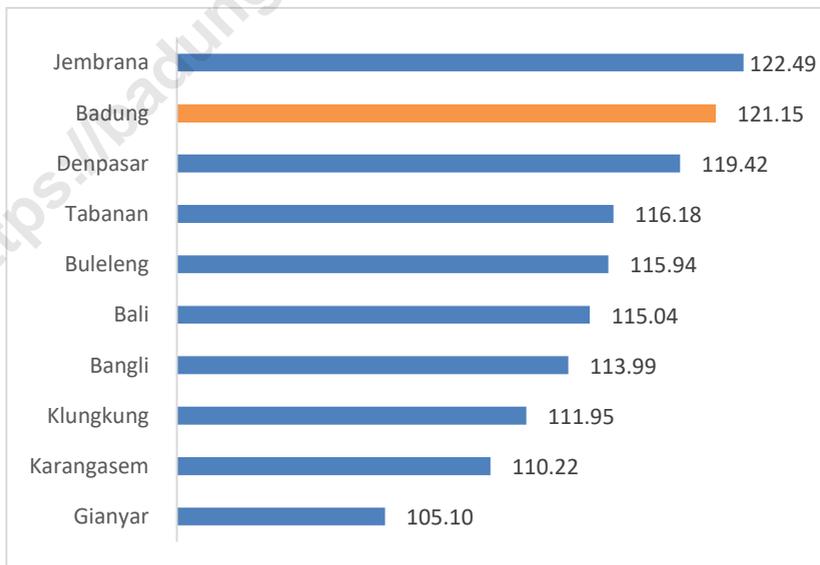


Sumber: BPS Kabupaten Badung

Pada tahun 2020, IKK Kabupaten Badung mencapai 121,15. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 126,12. Hal ini menunjukkan bahwa harga berbagai bahan konstruksi di Kabupaten Badung sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu IKK kabupaten Badung yang mencapai posisi kedua menunjukkan bahwa harga konstruksi di Kabupaten Badung relatif lebih mahal dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Gambar 8.2.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Badung

<https://badungkab.bps.go.id>

Bab IX

PARIWISATA

<https://badungkab.bps.go.id>

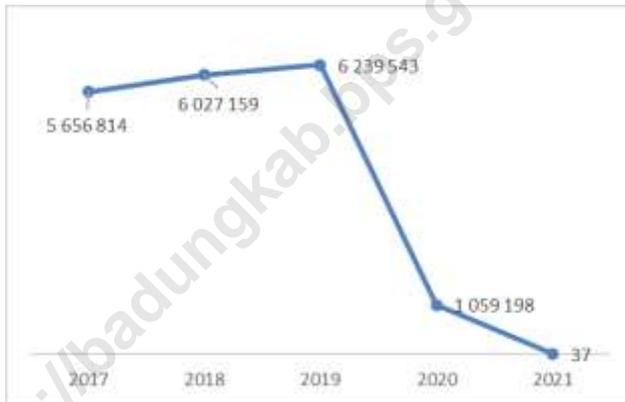
Tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata sangat berperan dalam perekonomian Bali. Tidak hanya Bali, sektor pariwisata dalam arti luas juga memegang peranan penting dalam perekonomian di Badung. Terbukti bahwa peranan sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) di Kabupaten Badung menduduki posisi pertama dalam kontribusinya terhadap PDRB. Tidak hanya itu, struktur penduduk Badung didominasi oleh struktur penduduk usia muda yang lebih memilih bekerja di sektor pariwisata dibandingkan dengan sektor pertanian.

Namun sejak adanya Pandemi Covid-19, pariwisata sangat terpuuk oleh adanya wabah ini. Kunjungan wisatawan mancanegara melalui bandara udara Ngurah Rai mengalami penurunan yang sangat signifikan. Padahal dapat dikatakan, kunjungan wisatawan mancanegara merupakan motor penggerak perekonomian khususnya di Kabupaten Badung. Pada tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandar Udara Ngurah Rai mencapai 1,059 juta orang. Angka ini jauh di bawah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun sebelumnya yang mencapai 6,239 juta orang. Bahkan di tahun 2021 ini, sampai dengan bulan Oktober 2021, tercatat wisatawan mancanegara yang datang ke Bali hanya mencapai 37 orang saja. Semoga kondisi ini segera pulih mengingat Kabupaten Badung sangat bergantung pada kategori

Akomodasi dan Makan Minum serta kategori Transportasi khususnya Transportasi Udara yang sangat berperan dalam perekonomian Kabupaten Badung.

Gambar 9.1

Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui
Bandara Udara Ngurah Rai Kabupaten Badung
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Badung

Catatan: Sampai bulan Oktober 2021

Seiring dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah hotel bintang di Kawasan Badung juga mengalami penurunan akibat penutupan atau penutupan sementara. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah hotel berbintang di Kawasan Kabupaten Badung pada tahun 2020 berjumlah 289 hotel, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sekitar 394 hotel.

Tabel 9.2
 Statistik Hotel di Kabupaten Badung
 Tahun 2018-2020

URAIAN	2018	2019	2020
Hotel Berbintang			
Jumlah Hotel	443	394	289
Jumlah Kamar	44 571	49 406	23 650
Jumlah Tempat Tidur	66 654	67 233	45 700

Sumber: BPS Kabupaten Badung

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BADUNG

JL. RAYA DARMASABA NO. 28, ABIANSEMAL, BADUNG
TELP. : (0361) 8441616, FAX : (0361) 8441717
HOMEPAGE : [HTTPS://BADUNGKAB.BPS.GO.ID](https://badungkab.bps.go.id)
E-MAIL : BPS5103@BPS.GO.ID

ISBN 978-602-6995-55-1

